

Melihat Kebijakan BBN Secara Utuh Sebagai Kebijakan Energi dan Iklim

Giorgio Budi Indrarto
Madani Berkelanjutan

16 November 2021



Transformasi ekonomi menuju pembangunan yang berkelanjutan



Tujuan SDGs 2030, agenda pemulihan dan transformasi ekonomi nasional

THE GLOBAL GOALS

Mencapai Ketahanan dan Kemandirian Energi



Mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak

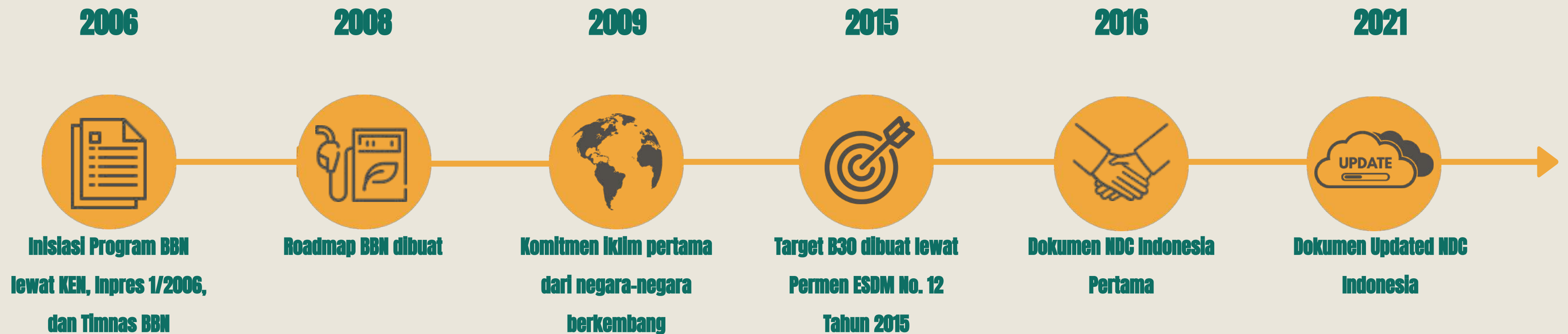
Mencapai NDC Indonesia 2030 dan Net Zero Emissions



Termasuk Agenda net sink FOLU 2030



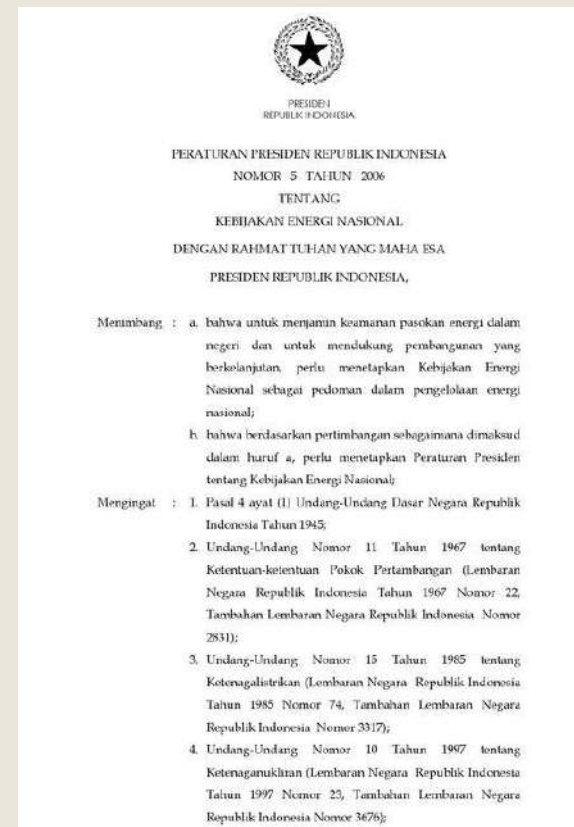
POTRET KEBIJAKAN BBN NASIONAL



Transformasi Kebijakan

Bahan Bakar Nabati

Kebijakan Energi



PP No 5 Tahun 2006



Rencana Umum Energi Nasional

Kebijakan Iklim

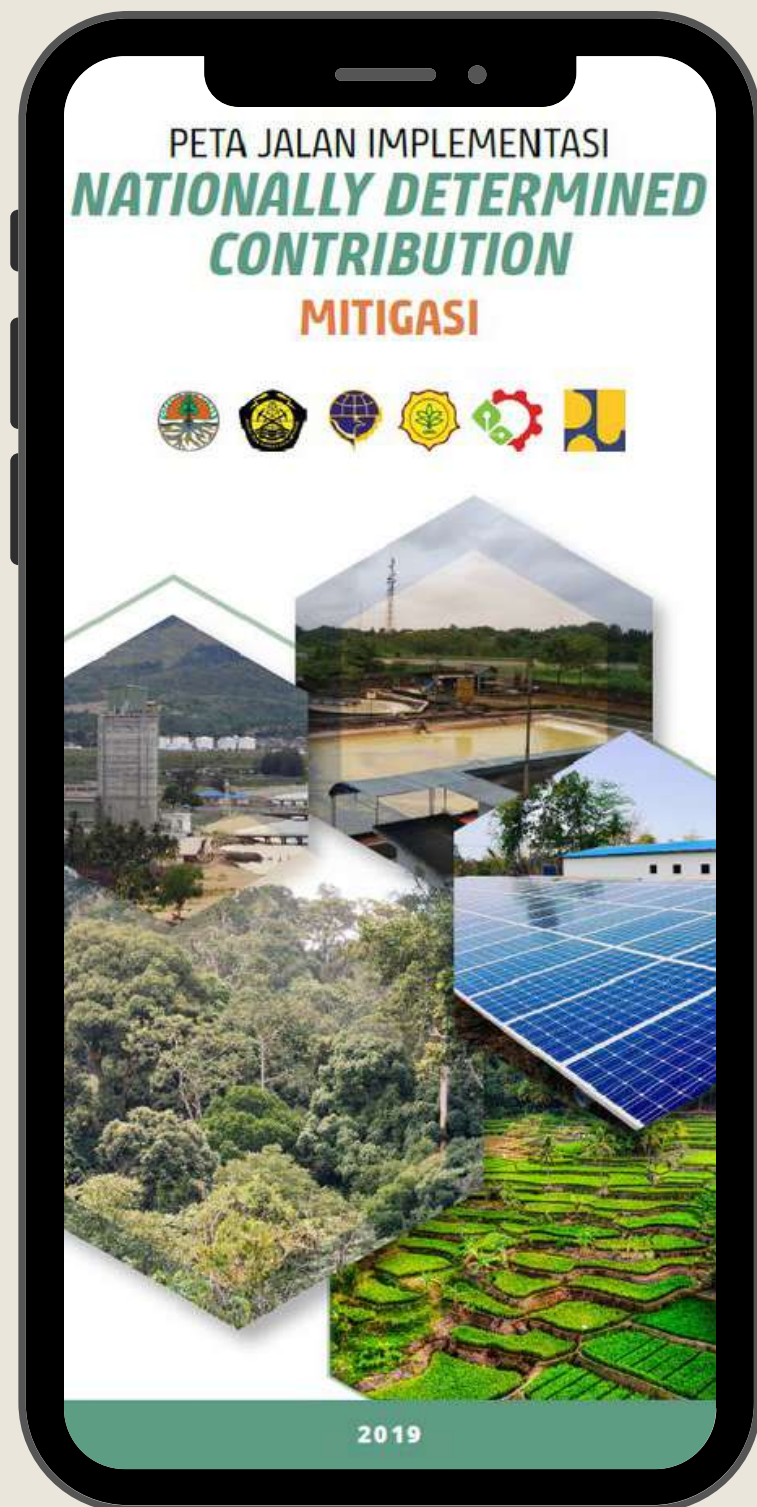


Updated NDC



LTS-LCCR





TRANSFORMASI KEBIJAKAN BBN NASIONAL

Blofuel diproyeksikan memainkan peran sentral dalam mencapai komitmen iklim dan net zero emission Indonesia



Implementasi blofuel di sektor transportasi diproyeksikan mencapai 90% dengan usaha sendiri (penurunan emisi 29%) dan 100% dengan dukungan Internasional (penurunan emisi 41%) pada 2030



Sawit diproyeksikan sebagai feedstock utama untuk sektor transportasi

**KENAPA SEKARANG BBN DISEMPITKAN HANYA
BIODIESEL SEBAGAI CLIMATE POLICY?**



TRANSFORMASI KEBIJAKAN BBN NASIONAL

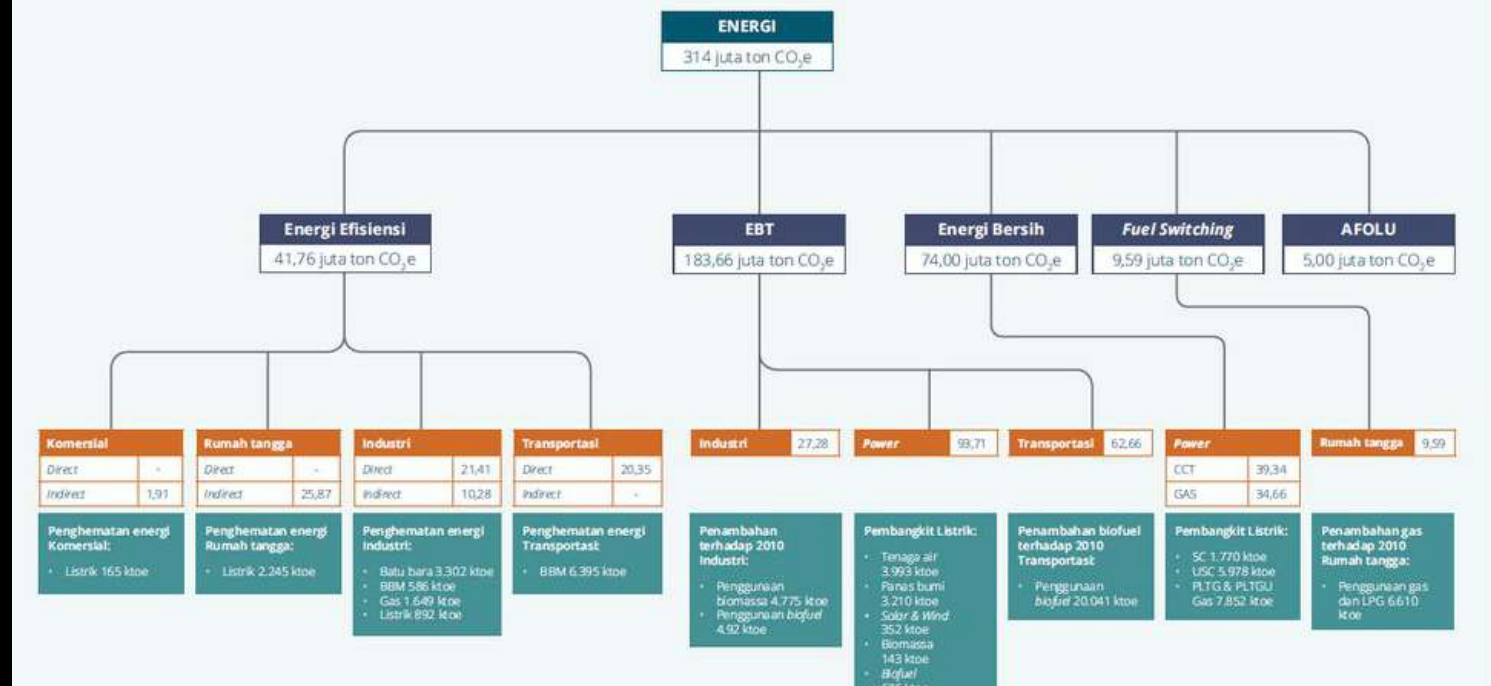


Total penambahan penggunaan biofuel untuk pembangkit, transportasi dan Industri 20.722 ktoe* (*penambahan dibandingkan 2010)

KENAPA BIOFUEL GENERASI 2 DAN 3 TIDAK ADA?



Gambar 4-6 Target penurunan emisi GRK skenario CM1 (*unconditional*) tahun 2030 berdasarkan jenis aktivitas mitigasi





TRANSFORMASI KEBIJAKAN BBN NASIONAL

Peran biofuel dalam mencapai net zero emissions 2060 atau lebih cepat akan semakin besar, tidak hanya dalam sub-sektor transportasi tapi juga pembangkit listrik



Biofuel berkontribusi pada target sektor listrik dengan kapasitas terpasang 14 GW



Biodiesel dilanjutkan hingga B50 sebesar 52,3 Juta KI sampai 2050 dengan catatan akan diproduksi secara berkelanjutan



Belum ada safeguards khusus untuk memastikan komitmen iklim tercapai (hutan, gambut, methane-capture)



Harga belum optimal secara keekonomian sehingga pendanaan belum berkelanjutan



Tata kelola hulu-hilir belum terkoneksi dengan baik



Traceability masih lemah



Belum ada kebijakan no deforestation & no peat dalam standar keberlanjutan sawit di sektor hulu biodiesel



Belum ada Integrated land-use planning yang khusus didedikasikan untuk penyediaan feedstock



Belum ada ambang batas (cap) perkebunan sawit di Indonesia sehingga ada risiko penambahan lahan dari ILUC





Terima Kasih

Kolaborasi untuk Indonesia Tangguh!

Unduh nawala terbaru kami di www.madaniberkelanjutan.id